

BAB VI

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada awalnya penulis ingin mengetahui peran komunikasi dalam hal ini melalui konsep demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas dapat mendorong proses penganggaran khususnya APBD Kota Padang tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan rakyat. Asumsinya pemerintah secara otonom dan mandiri menginterpretasikan sendiri tujuan bernegara menurut orientasi nilai dan kepentingan mereka sehingga makin lama terjadi penyimpangan dengan apa yang diinginkan rakyat. Disinilah peran demokrasi deliberatif sebagai kontrol terhadap pemerintah agar tetap sejalan dengan kebutuhan rakyat dalam mencapai tujuan bernegara.

Kemudian penulis melihat adanya unsur dari demokrasi deliberatif yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu suara masyarakat warga dan peran media dalam ruang publik penganggaran. Kondisi ini disebabkan karena kekuatan masyarakat warga tersingkir dalam perebutan pengaruh diruang publik politis dengan kekuatan dari aktor-aktor politik. Penulis melihat adanya hegemoni pemerintah yang berkuasa melalui pembentukan opini di media mengenai pencapaian atau keberhasilan konsep anggaran partisipatif dan musrenbang sebagai proses untuk mendapatkan legitimasi rakyat terhadap APBD.

Ada beberapa poin penting dalam tesis ini yang menggambarkan proses penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan APBD tahun 2017, merupakan suatu proses yang berhubungan dan berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diisi oleh pemenuhan atau pelaksanaan konsensus informal aktor politik kepada rakyat. Dinamika komunikasi yang terjadi antara walikota dan DPRD adalah bagaimana walikota dapat melaksanakan program prioritas dan DPRD dapat membawa program pembangunan ke daerah pemilihannya. Aspirasi warga melalui forum musrenbang diakomodasi hanya sebanyak 10% dan seringkali aspirasi yang tertuang dalam musrenbang sudah diubah dan ditentukan oleh birokrasi dari tingkat kelurahan hingga kota;
2. Terkait dengan konsep demokrasi deliberatif ruang publik penganggaran dan masyarakat warga dalam konteks penyusunan APBD bisa dikatakan tidak mendapatkan tempat karena keberadaannya tidak ada. Pengandaian yang paling mendasar dalam konsep ruang publik adalah kesadaran kolektif warga dan peran media dalam menjembatani hubungan rakyat dan pemerintah. Dalam masyarakat warga Kota Padang, kesadaran kolektif itu tidak ditemukan eksistensinya yang muncul justru kesadaran individu atau kelompok. Kondisi ini didukung oleh pengelompokan warga menjadi masyarakat tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan yang menyebabkan terjadinya persaingan antar kelompok warga. Begitu juga dengan fungsi media sebagai alat kontrol sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media lokal di Kota Padang lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah yang memberikan keuntungan ekonomis dari pada berpihak kepada rakyat dengan absennya kritik terhadap pemerintah;

3. Secara formal penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 berjalan dengan baik. Selain telah mendapatkan penghargaan dana rakca dari Kementerian Keuangan atas penetapan APBD tepat waktu, penyusunan RKPD tahun 2017 menjadi nominasi untuk mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas pada tanggal 29 Maret 2017. Namun, dari sudut pandang komunikasi penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 didominasi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif. Rakyat menjadi penonton dan pendengar berita-berita pembangunan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah baik melalui media massa maupun media lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan aktor politik, pemerintah beserta jajaran birokrat merebut dan menguasai informasi di ruang publik terutama media massa.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas diketahui permasalahan mendasar dalam penerapan konsep demokrasi delibertif terutama dalam proses penyusunan APBD Kota Padang adalah terjadinya kesenjangan antara ruang publik penganggaran dengan sistem politik dalam mempengaruhi penyusunan APBD. Pemerintah mendominasi proses penyusunan APBD dan keberadaan ruang publik penganggaran dapat dikatakan tidak ada. Padahal berdasarkan paham kedaulatan rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang pelaksanaannya dapat ditafsirkan melalui pemilu dan melalui prosedur komunikasi atau diskursus praktis di ruang publik politis. Menurut peneliti upaya perbaikan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan sistem yang dapat mendukung demokrasi deliberatif agar dapat beroperasi dengan baik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah; (1) melakukan revisi terhadap regulasi terutama terhadap proses perencanaan dimana menggunakan lima pendekatan sekaligus. Penulis menilai proses perencanaan akan memberikan kepastian terhadap keterlibatan warga jika ada ukuran yang jelas mengenai berapa nilai aspirasi warga dan berapa nilai visi, misi, dan program prioritas kepala daerah dalam APBD. Atau menghilangkan pendekatan partisipatif dan *bottom up* dari UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun diikuti dengan membatasi kerja sama media dengan pemerintah agar media dapat melaksanakan fungsi kontrol sosialnya; (2) Melaksanakan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab sehingga penguasaan informasi oleh pemerintah dapat dikurangi dan akses warga terhadap informasi publik menjadi terbuka. Namun penerapan UU ini juga juga masih menghadapi berbagai persoalan.¹ Oleh karena itu peneliti menyarankan menegakkan aturan secara tegas mengenai keterbukaan informasi publik dengan menciptakan suatu sistem prosedur komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Disini Humas Pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan komunikasi timbal balik sebagai jembatan antara masyarakat warga dengan pemerintah itu sendiri.

¹ Dalam beberapa penelitian menunjukkan masih terdapat kendala dalam penerapannya diantaranya ; Dessy Eko Prayitno,dkk (2012) mengungkapkan terdapat permasalahan dalam menafsirkan informasi yang dikecualikan, Vience Mutiara Rumata (2012) mengungkapkan permasalahan SOP dan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik, Khairunnisa Kamaliah (2015) mengungkapkan pada tingkat SKPD pembagian tugas administrasi belum jelas.

- b. Mendorong dilakukan penelitian lanjutan, terutama dari kajian politik mengenai penerapan konsep demokrasi delibertaif ini dalam proses penganggaran. Komunikasi bukanlah satu-satunya cara untuk memberikan solusi perbaikan dalam penyusunan anggaran, kajian politik seperti penarikan dukungan apabila pejabat publik tidak melaksanakan tugas sesuai amanat rakyat serta pembatasan masa jabatan anggota legislatif untuk menumbuhkembangkan ruang publik penganggaran.

